

ARAHAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KECAMATAN AMAHAI

Arlex S. Tahapary¹⁾, Pieter Th. Berhиту²⁾, Adnan A. Botanri³⁾

¹⁾S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Pattimura

Email: Tahaparyaxel24@gmail.com

²⁾Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura

Email: Patrickberhиту@gmail.com

³⁾Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura

Email: abotanri@gmail.com

Abstrak. Kecamatan Amahai memiliki beberapa potensis yaitu potensi pariwisata, mangrove, dan perikanan. penelitian ini berfokus pada satu rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Amahai. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat merumuskan pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Amahai. penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial. Dari hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Amahai memiliki potensi Mangrove yang berada di: desa makariki, desa sehat, desa haruru, dan desa amahai dengan luas 145,45 Ha. Potensi pariwisata di kecamatan amahai memiliki 9 tempat pariwisata. untuk potensi perikanan di Kecamatan Amahai suda ada pengelolaan di setiap Desa tetapi untuk pengelolaan yang lebih baik ada pada Desa Yainuelo dan Desa Rutah. permasalahan yang ada pada wilayah pesisir Kecamatan Amahai yaitu: permasalahan sampah, mangrove, abrasi, dan permukiman. dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan amahai. Dapat di buat beberapa arahan pengelolaan yaitu: pengelolaan sistem jaringan persampahan, pengelolaan pelestarian ekosistem mangrove, pembangunan talud dan breakwater untuk mencegah abrasi, menegaskan peraturan pembangunan permukiman dan melakukan relokasi pada permukiman di wilayah pesisir Kecamatan Amahai.

Kata kunci: Wilayah Pesisir, Arahan, Pengelolaan, Kecamatan Amahai.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya satu wilayah berkembang dari keadaan yang tingkat lokasi lebih rendah menuju kepada keadaan yang lokasi lebih tinggi. Meningkatnya lokasi tersebut menyebabkan bertambahnya problem kebijakan pengembangan wilayah yang sering menjadi tidak mudah diselesaikan. Terdapat banyak kasus pada problem pengembangan wilayah, dan problem-problem semacam ini akan terjadi pula dalam pengembangan wilayah pesisir. Pengembangan wilayah pada kawasan pesisir sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

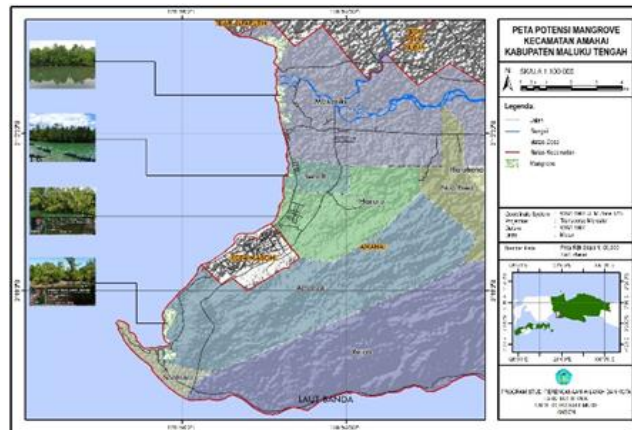
Wilayah pesisir (*coastal area*) merupakan suatu ekosistem yang khas dan menyimpan banyak potensi. Potensi yang biasanya dimanfaatkan sebagai pariwisata, industri, perikanan, permukiman, dan sebagainya. Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan tempat tinggal yang penting bagi manusia dan segala aktivitasnya.

Kecamatan Amahai memiliki banyaknya potensis kawasan pesisir dari sektor pariwisata dan perikanan. Dimana kecamatan amahai memiliki potensi kawasan pesisir di sektor pariwisata berjumlah 9 tempat wisata. Tetapi kurangnya fasilitas pada tempat-tempat pariwisata dan terdapat juga beberapa fasilitas yang rusak dan kurang terawat. potensis kawasan pesisir di sektor perikanan kecamatan amahai memiliki tingkat produksi perikanan tangkap yang tinggi karena mayoritas penduduk wilayah pesisir pada Kecamatan Amahai

B. Potensi mangrove pada Kecamatan Amahai

Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan di pengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak, maupun muara sungai di mana air melambat dan mengedepankan lumpur yang di bawahnya dari hulu. Fungsi utama dari mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami.

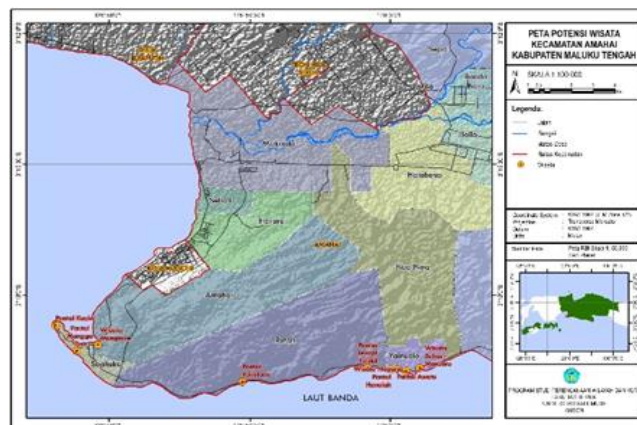
Secara umum letak wilayah Kecamatan Amahai berada di wilayah pesisir, yang menyebabkan adanya potensi mangrove pada beberapa titik lokasi yaitu: di Desa Amahai, Desa Haruru, Desa Sehati, dan Desa Makariki. luas penyebaran mangrove pada kecamatan Amahai yaitu sebesar 145,45 Ha. Kondisi mangrove di kecamatan Amahai masih dalam keadaan baik namun di beberapa lokasi terjadinya kerusakan yang di sebabkan dari penebangan liar hutan mangrove oleh masyarakat wilayah pesisir tetapi tidak dalam skala yang besar, dan akibat pengeringan (reklamasi) yang di peruntukan untuk pembangunan permukiman di wiayah hutan mangrove.



Gambar 2. Potensi mangrove Kecamatan Amahai

C. Potensi Pariwisata Kecamatan Amahai.

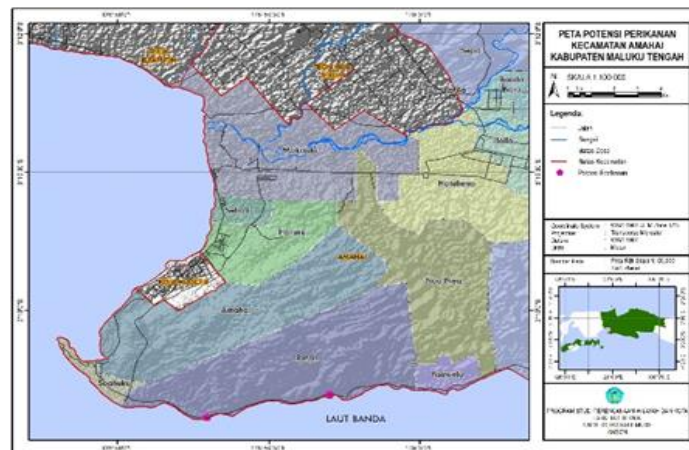
Kecamatan Amahai memiliki banyak potensi pariwisata karena secara umum letak posisi kecamatan Amahai berada di wilayah pesisir. Di bawah ini merupakan tempat pariwisata yang ada di Kecamatan Amahai. Potensi pariwisata pada Kecamatan Amahai lebih mengarah ke ekowisata dan wisata bahari di sebabkan karena Kecamatan Amahai terkanal akan potensi pantai berpasir dan adanya tanaman mangrove.



Gambar 3. Potensi pariwisata Kecamatan Amahai

D. Potensi Perikanan Pada Kecamatan Amahai

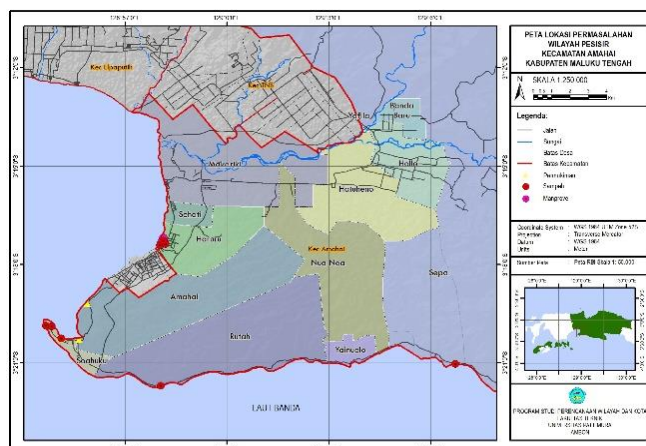
Kecamatan amahai memiliki potensi perikanan di beberapa desa. Produksi perikanan di Kecamatan Amahai terus meningkat, berdasarkan data BPS kecamatan amahai tahun 2021 produksi perikanan: 13.732,60 Ton dengan nilai Rp.82.007.752, pada tahun 2022 produksi perikanan 13.756,60 Ton dengan nilai Rp.82.008.752. Untuk pengelolaan perikanan di kecamatan amahai sudah di kembangkan, dengan adanya kelompok-kelompok nelayan yang ada di desa-desa pada kecamatan amahai. Untuk pengadaan sarana dan prasarana perikanan di kecamatan amahai setiap tahunnya Pemerintah Dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah dari setiap desa yang ada di kecamatan amahai khususnya di wilayah pesisir setiap tahun selalu memberikan bantuan-bantuan berupa sarana dan prasarana yaitu: perahu fiber, mesin, jarring dan sarana penunjang lainnya.



Gambar 4. Potensi perikanan Kecamatan Amahai

E. Permasalahan Wilayah Pesisir Kecamatan Amahai

Ada beberapa permasalahan yang di temui pada wilayah pesisir kecamatan amahai yaitu: Terjadinya kerusakan hutan mangrove di sebabkan oleh reklamasi di kawasan hutan mangrove dan pembangunan permukiman, Masyarakat masih membuang sampah di wilayah pesisir, Terjadinya abrasi/pengikisan air laut, Pembangunan permukiman terlalu dekat dengan wilayah pesisir dan beberapa bangunan di bangun di atas talud.



Gambar 5. Peta permasalahan wilayah pesisir Kecamatan Amahai

F. Arahan Pengelolaan

Dari pembahasan permasalahan wilayah pesisir pada Kecamatan Amahai yang di temui dapat dibuat beberapa arahan pengelolaan wilayah pesisir untuk menangani permasalahan-

permasalahan tersebut. Untuk pengelolaan permasalahan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Amahai. Dapat di buat perbaikan sistem jaringan persampahan dengan beberapa arahan pengelolaan yaitu:

1. Penyediaan TPS berupa Bak Penampungan Sampah di wilayah pesisir.
2. Penyediaan sarana angkutan sampah (gerobak sampah).
3. Penyediaan Bank sampah dan TPST-3R (Tempat pengolahan Sampah Terpadu-reduce, reuse, recycle) yang di kelola oleh masyarakat.

Dari pembahasan permasalahan pergusuran hutan mangrove yang ada pada wilayah pesisir Kecamatan Amahai. Dapat di buat pelestarian ekosistem mangrove dengan beberapa arahan pengelolaan mangrove yaitu:

1. Pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
2. Pembibitan anakan mangrove.
3. Melakukan reboisasi pada ekosistem mangrove yang telah rusak.

Dari pembahasan permasalahan abrasi pada wilayah pesisir kecamatan amahai dapat di buat arahan pengelolaan abrasi pada wilayah pesisir Kecamatan Amahai yaitu:

1. Pemerintah dapat Membangun tanggul penahan ombak atau talud dengan kualitas yang baik di titik-titik lokasi yang terjadinya abrasi.
2. Membangun breakwater (pemecah ombak) pada wilayah pesisir yang terjadi abrasi.

Dari pembahasan permasalahan permukiman di atas dapat di buat beberapa arahan pengelolaan pada permukiman yang ada pada wilayah pesisir Kecamatan Amahai yaitu:

1. Menetapkan regulasi terkait dengan pembangunan permukiman pada wilayah pesisir dalam tahap ini, pemerintah dapat menegaskan peraturan dan sanksinya jika masi terdapat permukiman yang melanggar atau timbul permukiman di wilayah pesisir.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pesisir Kecamatan Amahai dengan pentingnya menjaga fungsi sepadan pantai.
3. Melakukan penataan permukiman warga berupa relokasi permukiman Masyarakat.
4. Melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi wilayah pesisir dan sepadan pantai.

4. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat di Tarik kesimpulan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Amahai. Dapat di buat beberapa arahan pengelolaan yaitu: pengelolaan sistem jaringan persampahan, pengelolaan pelestarian ekosistem mangrove, pembangunan talud dan breakwater untuk mencegah abrasi, menegaskan peraturan pembangunan permukiman dan melakukan relokasi pada permukiman di wilayah pesisir Kecamatan Amahai

DAFTAR PUSTAKA

- Abelshausen, B., Vanwing, T., & Jacquet, W. (2015). Participatory Integrated Coastal Zone Management In Vietnam: Theory Versus Practice Case Study: Thua Thien Hue province. *Journal of Marine and Island Cultures*, 4(1), 42-53.
- Arsyad, N. Q. R. (2022). Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Lantebung Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Dahuri, R., J Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. (1996). *Pengelolaan Sumberda Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djaenuddin, dkk. 2003. *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian*. Bogor. Balai Penelitian Tanah, Puslitbang Tanah dan Agroklimat.
- Hardjowigeno dan Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hinrichsen, D. (1998). *Coastal Waters of the World: Trends, Threats, and Strategies*. Washington, D.C. Island Press.
- Hudha, N., & Rondonuwu, D. M. (2019). Kajian Pengembangan Pesisir Teluk Manado sebagai Kota Tepi Pantai. *Spasial*, 6(3), 800-809.
- Kay, R. And J. Alder. (1999). *Coastal Planning and Management*. E & FN Spon. London.

- Lasabuda, R, (2013) Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, (Jurnal Ilmiah Platax), hal, 93.
- Nimah, R. (2022). Implementasi Perda Kabupaten Tuban No. 09 Tahun 2012 Terhadap Permukiman di Sebatas Pantai Glondonggede. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 1 (3), 361-373.